

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI TERHADAP PERIZINAN MAGANG DI LUAR NEGERI (BARU)

| NO | PERSYARATAN |
|-----|---|
| 1. | Surat permohonan dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Jawa Barat (menggunakan Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel basah); |
| 2. | Scan Surat Kuasa menggunakan kop surat dibubuhi materai 6.000 apabila dikuasakan tanda tangan asli bukan scan, cap/stempel basah; |
| 3. | Scan Akte Notaris ASLI tentang Yayasan / Lembaga Pelatihan Kerja; |
| 4. | Scan Surat Keputusan ASLI tentang izin Lembaga Pelatihan Kerja dan Sertifikat Izin yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota atau Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau OSS; |
| 5. | Scan Kurikulum dan Silabus program pemagangan; |
| 6. | Scan Ijasah ASLI Ketua dan Ijasah ASLI Staf Pengajar; |
| 7. | Scan CV Ketua / Pimpinan (Penanggungjawab) Lembaga Pelatihan Kerja; |
| 8. | Scan Struktur organisasi Lembaga Pelatihan Kerja; |
| 9. | Dokumentasi sarana prasarana Lembaga Pelatihan Kerja; |
| 10. | Scan perjanjian teknis antara peserta dengan Lembaga Pelatihan Kerja (contoh salah satu MOU); |
| 11. | Scan MOU antara Lembaga Pengirim/Sending Organization (SO) dengan Lembaga Penerima Accepting Organization (AO) dicap Kedubes RI; |
| 12. | Scan ASLI Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri bagi LPK yang mengajukan izin perpanjangan; |
| 13. | Scan Asli NIB |